



PNI/MARHAENISME

(Pondjaraah singkat & Pokok² Pendjelasan)

Diterbitkan oleh:
Deppenprop D.P.P.-P.N.I.



Okt. 70

XORFB

PNI/MARHAENISME



Sedjarah singkat

PARTAI NASIONAL INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sedjarah Singkat Partai Nasional Indonesia ini dimaksudkan untuk sekedar mengisi ke-vacuum-an kepustakaan (literatur) yang menjangkut sedjarah lengkap PNI yang hingga pada waktu ini belum berhasil dibukukan.

Adalah menjadi pemikiran didalam Partai untuk menerbitkan sedjarah PNI setjara keseluruhan, baik yang menjangkut ke-Organisasian maupun Program2 perdjoangan beserta pelaksanaannya dari semendjak ia lahir pada tgl. 4 Djuli 1927. Namun hal tsb memerlukan persiapan2 yang lebih tjermat disertai penelitian2 serta pengumpulan bahan2, yang pada akhirnya memerlukan suatu djangka waktu yang tjukup lama.

Kebutuhan didalam masyarakat bangsa Indonesia termasuk Keluarga Besar PNI beserta dengan segenap massa Marhaennja terhadap bahan2 batjaan yang memuat keadaan beserta tingkahlaku PNI sebagai suatu badan perdjoangan, mendorong kami untuk menerbitkan risalah yang sangat sederhana ini.

Risalah ini memuat 3 hal, j.l. :

Pertama - tentang sedjarah PNI yang ditekankan kepada Kongres demi Kongres semendjak lahirnja pada tgl. 4 Djuli - 1927 dalam hubungannya dengan program maupun garis-politiknya ditengah2 perkembangan situasi politik hingga masa sekarang ini ;

Kedua - tentang pokok2 pendjelasan mengenai Marhaenisme ;

Ketiga - uraian tentang sumber Marhaenisme yang diiringi oleh pendjelasan tentang essensialia Marhaenisme ;

Kesemuanya dimaksudkan untuk menjadi bahan bagi setiap fihak, baik golongan maupun individu untuk dapat mengetahui setjara djelas tentang "A-B-C"-nja PNI dan Marhaenisme.

Tudjuan daripada penerbitan risalah ini a.l. adalah agar semua fihak, baik golongan maupun individu, apakah masyarakat Bangsa Indonesia sendiri ataupun masyarakat di Luar Negeri untuk mengenal dari dekat serta mengetahui apa dan bagaimana PNI dan Marhaenisme, sehingga sedjauh mungkin dapat dihindarkan adanya interpretasi yang salah terhadapnja. Bahwa bilamana selama ini terdapat adanya interpretasi maupun pengertian yang salah didalam kalangan masyarakat terhadap (terutama) ideologi Marhaenisme -- ketjuali dari fihak2 yang memang dilandasi unsur kesengadjaan -- dapat dipandang sebagai akibat dari kurang djelasnja diketahui tentang faham tsb.

Adalah menjadi hak dari setiap orang diluar PNI dan Organisasi Massa PNI untuk sependapat atau tidak sependapat tentang apa yang dikemukakan didalam risalah ini, namun hal itu tidak mengurangi kebenaran nilai2 ideologis yang terdapat didalamnya, yang njatannya adalah suatu ideologi yang memimpin perdjoangan PNI selama lebih dari 5 windu, yang bagi PNI tentunya untuk seterusnya akan menjadi azas, ideologi, faham dan tjara perdjoangan.

Karena risalah ini dimaksudkan pula sebagai bahan kelengkapan bagi risalah2 berikutnya, maka adalah menjadi kewajiban kami melalui kesempatan ini untuk mengundang sumbangsih terutama dari Keluarga Besar PNI dan Massa Marhaennja berupa bahan-bahan maupun dokumen2 sedjarah PNI, baik Nasional, Regional maupun setempat yang terdapat diseluruh Indonesia.

Semoga penerbitan risalah ini menemu sasaraannya.

Djakarta, 7 Oktober 1970.-

Departemen Penerangan & Propaganda

D.P.P. - P.N.I.

BAB-I
tentang
SEDJARAH SINGKAT PNI

4 DJULI 1927 :

Pada tgl. 4 Djuli 1927 Ir Soekarno, Ir Anwari, J. Tilaar, Sudjadi, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr Sartono, Mr Budyardjo Martoatmodjo, Dr Samsi Widagdo dan Mr Sunarjo mendirikan "Perserikatan Nasional Indonesia" di Bandung. Pengurus Besar (Hoofdbestuur) PNI jang pertama ialah : Ketua (Pemuka) - Ir Soekarno ; Sekretaris/Bendahara - Mr Iskaq dan Anggota2 terdiri dari Dr Samsi, Mr Sartono, Mr Soenari dan Ir Anwari.

Didalam Kongres PNI jang pertama di Surabaya tgl. 28-30 Mei 1928, nama "Perserikatan Nasional Indonesia" diganti menjadi "Partai Nasional Indonesia". Pada Kongres itu pula disahkan Anggaran Dasar (Statuten), Azas dan Daftar Usaha Partai.

Semendjak berdirinja, maka PNI selalu memelopori usaha persatuan dan kesatuan bangsa dalam perdjoangan menentang pendjadjahan Belanda demi mempertjepat Kemerdekaan Bangsa.

Tgl. 4 Djuli 1927 ditetapkan oleh PNI sebagai Hari Lahirnja.

25 APRIL 1931 :

Dikeluarkannja sebuah "Maklumat Kepada Sekalian Rakjat Indonesia", jang antara lain menjatakan membubarkan PNI. Maklumat tsb, jang ditandatangani oleh 19 orang Pimpinan PNI, ditjetuskan dalam suatu Kongres Luar Biasa (Kongres ke-II) PNI di Djakarta.

Sebab jang terpenting dibubarkannja PNI adalah karena penangkapan jang dilakukan oleh Penguasa atas 4 anggota Pimpinan PNI jang kemudian didjatuhi hukuman, j.i. Ir Soekarno, Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supriadinata (24 Desember 1929).

Setelah PNI dibubarkan, Pimpinan/Anggota2 PNI bergerak dalam Partindo, Gerindo dan Gapi jang terus berdjwang, termasuk pula masa pendjadjahan Djepang hingga dengan Proklamasi Kemerdekaan R.I.

29-31 DJANUARI 1946 :

Pada tgl. ini PNI melangsungkan Kongres di Kediri, jang kemudian disebut sebagai Kongres Ke-I, sehingga didalam tjtatan urutan Kongres2 jang diadakan oleh Partai ini, kedua Kongres sebelumnya tidak dimasukkan.

Didalam Kongres ke-I ini PNI jang telah bergerak di Pati, Madiun, Palembang dan Sulawesi, "Serikat Rakjat Indonesia" (Serindo), "Partai Republik Indonesia" di Madiun, "Gerakan Republik Indonesia" dll ber-fusi menjadi PNI.

Kongres Kediri ini menetapkan bahwa azas PNI ialah : "Sosio-Nasional-Demokrasi" jang kemudian dimanifestasikan dalam Lambang PNI j.i. "segitiga dengan kepala banteng" jang menggambarkan sintese dari nasionalisme-demokrasi dan sosialisme.

Pada tgl. 25-26 Desember 1946 PNI mengadakan Kongres Luar Biasa untuk menentukan sikap terhadap Naskah Persetujuan Linggardjati. Sikap tsb ialah : Tidak menerima naskah Persetujuan Linggardjati karena tidak mengandung pengakuan de jure terhadap R.I.

PNI bersama partai2 lain jang menolak naskah tsb bergabung didalam "Banteng Republik Indonesia" melawan "Sajap Kiri".

3-5 MARET 1947 :

Kongres PNI ke-II di Madiun.

Didalam Kongres ini a.l. ditetapkan garis2 perdjoangan dalam bidang2 : Pemuda, Wanita, Buruh dan Tani. Mula2 pelaksanaan garis2 perdjoangan bidang2 tsb ditampung dan merupakan seksi dalam PNI dan didalam perkembangannja melahirkan Organisasi2 Massa Marhaen.

Pada bulan Oktober 1947 dilangsungkan suatu Konperensi di Solo, dimana untuk pertama kalinya lahir istilah Ketua Umum dan Sekretaris Djenderal dalam kepemimpinan PNI.

25-27 DJUNI 1948 :

Kongres PNI ke-III di Jokjakarta.

Pada Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah : "Sosio-Nasional-Demokrasi" (Marhaenisme), jang merupakan gabungan dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.

Sesudah Kongres ini, dua tragedi Nasional telah melanda Tanah Air : Pertama, pemberontakan PKI Madiun tgl. 18-

September 1948. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI mengadjak PNI dan Masjumi untuk membentuk Front Nasional, akan tetapi ditolak oleh kedua Partai tsb.

Kedua, perang Kolonial ke-II (Agresi ke-II) yang dilantjar oleh Tentara Belanda terhadap R.I. pada tgl. 19 Desember 1948.

Dewan Partai menginstruksikan kepada seluruh Anggota/Pimpinan PNI, untuk bersikap dan bertindak non-koperasi dengan Belanda.

1-5 MEI 1950 :

Kongres PNI ke-IV di Jokjakarta.

Kongres menetapkan a.l. agar setjepat-tjepatnja dirobah kembali bentuk ketata-negaraan yang berbentuk federasi (RIS) menjadi Negara Kesatuan, karena Negara Kesatuan paling sesuai dengan paham persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sendiri, dan tidak memberikan kesempatan kepada Belanda untuk menjalankan politik "divide et impera"-nja kembali.

1-5 MEI 1951 :

Kongres PNI ke-V di Djakarta.

Kongres menetapkan Pimpinan Partai menjadi Dewan Pimpinan Partai, sebagai Badan yang tertinggi didalam Partai dibawah Kongres. Dewan Pimpinan Partai menjalankan pimpinan partai sehari-hari.

Peristiwa penting yang setjara langsung dirasakan oleh PNI sesudah Kongres ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952. Pimpinan Pemerintahan pada waktu itu ialah Kabinet Wilopo.

Didalam pimpinan partai, Wilopo menduduki jabatan Wakil Ketua Umum, sesuai dengan Keputusan Kongres.

6-11 DESEMBER 1952 :

Kongres PNI ke-VI di Surabaya.

Dalam Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah Marhasisme, dan tidak menggunakan

lagi istilah Sosio-Nasional-Demokrasi.

15-22 DESEMBER 1954 :

Kongres PNI ke-VII di Bandung.

Diantara keputusan2 yang ditjapai dalam Kongres ini, ialah :

1. Menjetudjui maksud Kabinet Ali-Arifin untuk mengadakan Konperensi Asia Afrika ;
 2. Meneruskan perdjoangan meng-claim Irian Barat ;
 3. Mengandjurkan supaya Kabinet bertindak tegas terhadap anasir2 pengatjau dan gerombolan2 musuh Negara.
- Pada tgl. 18-24 April 1955 ternjata Konperensi Asia-Afrika ke-I diselenggarakan di Bandung.
- Tokoh2 PNI yang setjara langsung berpartisipasi dalam KAA ini ialah Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri, Sunario sebagai Menteri Luar Negeri, A.K.Gani sebagai Menteri Perhubungan, Ruslan Abdulgani sebagai Sekdjen Kementerian Luar Negeri dan Sanusi sebagai Gubernur Djawa Barat.
- 29-30 September 1955 diadakan Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia dimana 4 (empat) partai2 keluar sebagai Partai2 Besar, j.i. PNI, Masjumi, NU dan PKI.

22-28 DJULI 1956 :

Kongres PNI ke-VIII di Semarang.

Keputusan2 Kongres a.l. :

1. Mempertjepat pembatalan seluruh perdjanjian KMB ;
2. Melandjutkan perdjoangan pengembalian Irian Barat kepada R.I. ;
3. Kongres diadakan 4 tahun sekali ;
4. Pimpinan Partai dibagi atas Dewan Pimpinan yang menjalankan kekuasaan executive dan Badan Pekerdja Kongres yang menjalankan kekuasaan legislatif ;
5. Suapaja diadakan perumusan tentang pengertian demokrasi dengan pimpinan dan Demokrasi Terpimpin, sehingga tidak menimbulkan kesan kearah paham sentralis me/diktatur.

5 DJULI 1959 :

Dekrit Presiden.

Sebelum dikeluarkannja Dekrit Presiden ini, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirim kawat kepada Presiden yang pada waktu itu berada di Tokio (16 Djanuari 1959) agar Presiden mendkritkan berlakunja kembali UUD-1945.

Sementara itu DPP-PNI menginstruksikan kepada Fraksi PNI di Konstituante, supaya

tidak usah lagi menghadiri sidang² Konstituante.

Sikap PNI ini diambil mengingat Konstituante tidak berhasil memutuskan kembali kepada UUD-1945 sesuai dengan harapan sebagian besar Rakyat dan Pemerintah, dan hal ini mengakibatkan Negara dalam keadaan bahaya.

25-29 DJUNI 1960 :

Kongres PNI ke-IX di Solo.

Keputusan² Kongres a.l. adalah sbb :

1. Azas PNI ialah Marhaenisme ;
2. Memberikan gelar Bapak Marhaenisme kepada Bung Karno ;

28 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER 1963 :

Kongres PNI ke-X di Purwokerto.

Keputusan² Kongres a.l. adalah sbb :

1. Gerakan Massa Marhaen mengakui PNI sebagai induk organisasi dan Pimpinan Front Marhaenis, serta pengawasan PNI setjara preventif dan repressif terhadap Gerakan Massa Marhaen ;
 2. Untuk membina kebulatan Front Marhaenis, dibentuk Badan Musjawarah Front Marhaenis.
- Pada tgl. 13-17 Nopember 1964 diadakan Sidang Badan Pekeraja Kongres PNI di Lembang Bandung. Sidang BPK ini menerima "Deklarasi Marhaenis" yang didalamnya ditjantumkan rumusan "Marhaenisme" ialah Marxisme" yang ditrapkan sesuai dengan kondisi² dan situasi Indonesia".
- Sesudah Sidang di Lembang itu, timbul perbedaan pendapat dalam kalangan Pimpinan PNI, sehingga pihak Ali-Surachman memetjat beberapa tokoh PNI pada tgl. 4 Agustus 1965, a.l. Osa Maliki, Saibilal Rasjad, Hardi, Hadisubeno dan Mh. Isnaeni.
- Perlu ditjatat bahwa Hardi dan Mh. Isnaeni adalah masing² Ketua I dan Wk. Sekdjen PNI pilihan Kongres Purwokerto.
- Pada tgl. 6 Oktober 1965, lima hari sesudah pemberontakan G.30.S/PKI, tokoh² tsb. mendirikan DPP PNI baru yang kemudian terkenal dengan nama PNI Osa-Usep.

24-27 APRIL 1966 :

Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM di Bandung, yang djuga di-

sebut Kongres ke-XI.

Kongres ini didahului oleh pertemuan bersama dari pihak Ali-Surachman dan pihak Osa-Usep, pertemuan mana adalah atas prakarsa serta disaksikan oleh Let. Djen. Suharto yang pada waktu itu sebagai pemegang Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).

Kongres ini diselenggarakan oleh Panitia Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM yang diketuai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo.

Keputusan² Kongres a.l. :

1. PNI/FM harus dibersihkan dari unsur² Gestapu/PKI dan unsur² yang menimbulkan perpetjahan dalam tubuh PNI/FM ;
2. Kongres merupakan instansi tertinggi Partai, Madjelis Permusjawaratan Partai sebagai Badan Legislatif dan Badan Konsultasi dan Koordinasi antara Partai dengan Gerakan Massa Marhaen.

Tgl. 28-30 Nopember 1966 diadakan Sidang MPP-PNI ke-I, dengan keputusan² a.l. : mentjabut "Deklarasi Marhaenis" dan menetapkan "Yudya Pratidina Marhaenis" sebagai Pedoman Perdjoangan PNI.

Tgl. 23-25 Djuli 1967 diadakan Sidang MPP PNI yang ke-II.

Sebelum dan sesudah Sidang MPP ke-II ini, PNI menghadapi tantangan² yang luar biasa baik setjara intern maupun (terutama) extern. Tekanan², antjaman² setjara langsung maupun tidak langsung ditudjukan kepada PNI, bahkan terdapat iktikad yang tidak baik dari pihak tertentu dengan maksud dan usaha untuk membubarkan PNI. Periode sebelum dan sesudah MPP-PNI yang ke-II merupakan periode konflik yang mul ti-kompleks.

Namun MPP dapat menghasilkan keputusan² penting a.l. menjangkut bidang Organisasi, Ekubang dll serta program² lainnja.

20 DESEMBER 1967 :

"Pernyataan Kebulatan Tekad" Dewan Pimpinan Pusat PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI.

Pernyataan tsb. a.l. memuat :

1. Azas PNI adalah Marhaenisme yang rumusannja ialah : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi ;
2. Melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967 dan tidak menghendaki kembalinja Ir Sukarno dalam kepemimpinan Negara/Pemerintahan/Nasional ;
3. Gelar Bapak Marhaenisme ditiadakan.

21 DESEMBER 1967 :

- "Instruksi Presiden Republik Indonesia

No.16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI".

Instruksi ini ditudjukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah untuk membantu dan memberikan kesempatan atas usaha2 PNI dalam melakukan kristalisasi dan konsolidasi sesuai dengan pokok2 kebidjaksanaan Pemerintah dan Pernyataan Kebulatan Tekad.

- Pada tgl.21 Desember 1967 ini pula dikeluarkan Surat Presiden (Pd) Republik Indonesia kepada DPP-PNI tentang hak hidup PNI.

Dengan demikian, tiga naskah2 tsb. diatas j.i. 1. Pernyataan Kebulatan Tekad DPP-PNI beserta DPP/Presidium Organisasi Massa PNI, 2. Instruksi Presiden No.16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI dan 3. Surat Presiden RI kepada DPP-PNI telah memberikan babak baru bagi perdjongan PNI untuk mengadakan kristalisasi, konsolidasi dan rehabilitasi didalam tubuhnja.

- Pada tgl.4-6 Mei 1968 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-II, dengan keputusan2 al.: Menetapkan "Paks sha Adigama" sebagai haluan politik Partai, Pokok2 pendjelasan tentang Marhaenisme" sebagai kete rangan azas dan tudjuan Partai ; "Marhaenisme berlawanan dengan Marxisme" dan PNI dan Marxisme" sebagai pelengkap keterangan azas dan tudjuan Partai. Djuga ditetapkan bahwa istilah "Bapak Marhaenisme" ditiadakan, dan istilah "Fron Marhaenis" dan "Gerakan Massa Marhaen" masing2 diganti dengan "Organisasi Massa PNI" atau "Ormas2 PNI" dan "Organisasi Massa Marhaen".

Sedjak Sidang MPP-PNI jang ke-III tsb PNI telah berada dalam posisi jang memungkinkan untuk meningkatkan partisipasinja dalam pelaksanaan Ketetapan MPRS dan Pelita I jang take off-nja adalah setahun kemudian (1 April 1969).

- Pada tgl.3-5 April 1969 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke IV dengan keputusan2 a.l. : Pembaharuan struktur politik setjara konstitusional-demokratis ; menerima Dwifungsi ABRI dan diusahakan agar dengan "act of free choice" dapat

memasukkan kembali Irian Barat kedalam Wilayah Negara Kesatuan R.I.

- Pada tgl.2-8 Pebruari 1970 PNI mengadakan Musjawarah Besar (Mubes) Ekonomi jang ke-I di Djakarta. Hasilnja ialah, disusunja suatu Konsepsi dan Program Perdjongan PNI dibidang Ekubang jang kemudian diterima baik mendjadi keputusan oleh Kongres PNI jang ke-XII di Semarang.

- Pada tgl.9 Maret 1970 ditjetuskannja "Deklarasi 9 Maret" oleh Partai2 PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katholik jang bersedia bekerdjasa dalam satu kelompok, jang kemudian disebut "Kelompok Demokrasi Pembangunan".

11-18 APRIL 1970 :

Kongres PNI ke-XII di Semarang.

Keputusan2 Kongres Semarang a.l.adalah sbb :

1. Azas PNI ialah Marhaenisme, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa - Sosio Nasionalisme - Sosio Demokrasi, jang berarti sama dengan Pantjasila dan menolak Deklarasi Marhaenis ;
2. Menugaskan kepada DPP-PNI untuk membentuk Dewan Pertimbangan Partai (Deperpa) dan merehabilitir seluruh anggota PNI jang dischors/dipetjat sepanjang tidak terlibat G.30.S/PKI ; x)
3. Menerima Dwifungsi ABRI sebagai kenyataan sedjarah jang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan tegaknja Pantjasila dan UUD-1945 dan kesedjahteraan Rakjat;
4. Untuk mentjapai penjederhanaan kepartaian sebagai pelaksanaan Tap MPRS No.XII/MPRS/66, maka RUU Kepartaian/Keormasan/Kekaryaan perlu segera diselesaikan.
5. Menerima "Pernyataan Kebulatan Tekad" DPP-PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI tgl.20 Dsemer - 1967 ;
6. Masalah Perang Vietnam diselesaikan oleh Bangsa jang bersangkutan sendiri tanpa intervensi Negara Asing, dan masalah Timur Tengah djangan didjadikan kantjah pertikaian antara negara2 besar didunia.
7. Susunan DPP-PNI, sbb :

Ketua Umum	: Hadisubeno Sosrowerdojo.
Ketua I	: E Mh.Isnaeni.
Ketua II	: Prof.Dr.Sunawar Sukowati S.H.
Ketua III	: Drs Hardjantho S
Ketua IV	: Prof.Usep Ranawidjaja SH
Ketua V	: I.B.P. Manuaba.
Ketua VI	: I.A. Moeis.

(Bersambun kehal 8).-

x) setjara langsung maupun tidak langsung

BAB-II
POKOK-POKOK PENDJELASAN
tentang
MARHAENISME

I. MARHAEN DAN MARHAENIS

Adalah suatu kenyataan sejarah, bahwa sebagian terbesar (paling tidak 91%) dari Rakyat Indonesia terdiri dari tani ketjil, buruh ketjil, pegawai ketjil, pedagang ketjil, pengusaha ketjil, jaitu Rakyat miskin, yang hidupnya selalu mengalami kekurangan.

Mereka mempunyai nasib yang sama, yang sehari-harinya selalu terantjam oleh gentjetan ekonomi dan oleh karena itu mereka termasuk golongan yang malang nasibnya.

Golongan inilah yang dalam lingkungan PNI dinamakan kaum Marhaen. Artinya kaum melarat, kaum yang dimelaratkan oleh kondisi pendjadjahan, oleh suatu Bangsa atas Bangsa lain dengan segala bentuk kolonialisme.

Didalam suasana kolonialisme yang ber-abad2 itu, sebagian besar Rakyat Indonesia yang berjumlah k.l. 91% itu yang terdiri dari kaum yang melarat dan yang dimiskinkan, j.i. kaum Marhaen, tidak mengalami kemajuan dan tidak pernah menikmati kebahagiaan. Dan untuk memajukan Rakyat/Bangsa Indonesia harus ada perjuangan peningkatan taraf hidup kaum Marhaen dimana ia berada dan dari golongan apapun. Kemakmuran dan kebahagiaan kaum Marhaen, berarti kemajuan dan kebahagiaan seluruh Rakyat/Bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan ini perlu adanya perjuangan. Perjuangan menudju kearah terwujudnja masyarakat yang sama rata sama bahagia lahir dan bathin, masyarakat yang didalamnya tidak terdapat penindasan oleh manusia terhadap manusia atau oleh golongan terhadap golongan. Masyarakat itulah yang kita sebut masyarakat Marhaenis, atau masyarakat Pantjasila, masyarakat -

adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan siapapun yang berdjoung untuk kepentingan tertjapainja tudju an perdjoungan seperti tsb. diatas, maka ia kita sebut seorang Marhaenis. Dengan lain perkataan, seorang Marhaenis adalah yang berdjoung untuk mentjapai masyarakat Sosialis Pantjasila, yang berarti sekaligus merupakan masyarakat yang bahagia bagi kaum Marhaen dimanapun ia berada dari golongan apapun.

II. MARHAENISME.

Marhaenisme adalah pandangan hidup Artinya Marhaenisme adalah satu azas, satu ideologi, satu faham dan tjara perdjoungan kaum Marhaen dan Marhaenis. Dengan landasan azas dan tjara perdjoungan Marhaenisme, kaum Marhaen dan Marhaenis berdjoung untuk mentjapai masyarakat adil dan makmur, atau masyarakat Marhaenis, atau masyarakat Sosialis Pantjasila.

Marhaenisme sebagai azas, sebagai ideologi dan sebagai faham politik, mengandung tiga unsur, ialah :

- a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;
- b. Sosio-Nasionalisme ;
- c. Sosio Demokrasi.

SOSIO - NASIONALISME

Dalam sedjarah dunia, faham kebangsaan atau Nasionalisme, sering dihingapi oleh sifat angkara murka, sifat bentji kepada bangsa lain, sifat chauvinistis dan agressif. Sifat2 yang demikian achirnja menumbuhkan sikap ingin mendjadjah bangsa lain. Faham itu adalah faham kebangsaan yang dipe-ralat oleh kapitalisme dan imperialisme.

Sosio-nasionalisme mempunyai watak dan sifat2 yang lain, karena Sosio-nasionalisme adalah faham kebangsaan yang berdasarkan pada persamaan nasib, faham kebangsaan gotong-rojong, faham kebangsaan yang berdasarkan hidup ke-masyarakatan, faham kebangsaan yang berperi-kemanusiaan, faham kebangsaan yang berlandaskan pada keinginan ker-djasama dan tidak untuk menggentjet atau menghisap.

Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang positif-kreatif, faham kebangsaan yang mentjipta dan memudja.

Sosio berarti kemasjarakatan jang sadar akan kemanusiaan. Dan apabila berbitjara tentang kemasjarakatan dan kemanusiaan, tidak bisa menghindarkan diri dari rasa me mudja, jang harus diartikan mengabdikan kepada Tuhan Jang Maha Esa. Karena tjelakalah manusia jang tidak silaturachmi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itulah, maka sosio-nasionalisme dengan sendirinja mengandung unsur ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sosio-nasionalisme atau faham kebangsaan, dalam lingkungan bangsa sendiri, bangsa Indonesia, harus bergotong-rojong, dan antara bangsa Indonesia dengan lain2 bangsa djuga harus bekerdja sama dengan pengertian setingkat dan sederajat. Dalam pengertian ini terkandung sifat ethis, tjinta kasih sesama makhluk, sehingga tiada hasrat menguasai dan dikuasai.

Dengan demikian, maka sosio-nasionalisme selalu berwatak anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

SOSIO-DEMOKRASI

Sosio-demokrasi adalah demokrasi lengkap, atau demokrasi komplit. Artinja demokrasi jang mentjakup dan meliputi : demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan demokrasi kebudayaan.

Demokrasi politik mengakui hak setiap warga negara, hak rakyat untuk mengatur pemerintahan, menentukan haluan dan susunan negara. Demokrasi ekonomi mengakui hak setiap warga negara atau setiap orang untuk hidup sama2 makmur, sama2 mengatur penghidupan dan kehidupan. Demokrasi ekonomi berarti mengakui hak hidup setiap warga negara setjara luas dan baik dalam bidang2 perekonomian.

Demokrasi sosial mengakui hak setiap warga negara, atau setiap orang untuk mendapat penghargaan jang sama sebagai makhluk sosial. Demokrasi sosial oleh karenanja mengakui hak setiap orang untuk mentjapai tingkat kemadjuan, tingkat kedudukan sosial setinggi-tingginja dalam segala lapangan dan bidang, sesuai dengan bakat dan kemampuannja. Demokrasi kebudayaan mengakui hak

setiap warga negara dan setiap orang untuk mengembangkan kebudayaan dan menikmati keindahan dan manfaat kebudayaan. Dalam sosio-demokrasi djelas dikehendaki adanya persamaan hak bagi setiap orang, bagi setiap manusia sebagai sesama ummat Tuhan Jang Maha Esa.

Dengan demikian djelas, bahwa dalam sosio demokrasi djuga tertjakup unsur ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sosio-Demokrasi menghendaki :

a. Dalam lapangan politik susunan Pemerintahan berdasarkan kedaulatan Rakyat, bentuk Pemerintahan jang sesuai dengan kehendak suara Rakyat dan bentuk negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dalam bidang kemasjarakatan, satu susunan masjarakat jang berdasarkan gotong rojong, atau masjarakat Sosialis Pantjasila.

Oleh karena itu sosio-demokrasi menolak setiap matjam kapitalisme, termasuk Staats-kapitalisme dan berdjoang untuk mewujudkan kehidupan koperatip. Sosio-demokrasi memberi kemungkinan berkembangnja usaha swasta, dalam pengertian tidak menimbulkan akibat hak milik atas alat2 produksi menjebabkan adanya penindasan dan penghisapan.

Kesimpulannja : Marhaenisme adalah satu ideologi, atau faham jang termasuk dalam golongan faham Sosialisme, terdiri dari 3 unsur : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-nasionalisme dan Sosio demokrasi.

Dengan perkataan lain : Marhaenisme adalah Sosialisme Pantjasila.

III. MARHAENISME, MARXISME DAN PANTJASILA

Marxisme adalah satu ideologi jang berlandaskan pada karya dan hasil pemikiran Marx. Ada beberapa basic ideas, prinsipalia jang sangat penting dari Marxisme sebagai pentjerminan kemurnian faham atau ideologi tsb. Diantara sekian banyak prinsipalia dan essonsialia jang menonjol ialah :

a. Marxisme tidak mengenal nasionalisme atau faham kebangsaan, oleh karena sifatnja jang internasionalistis-kosmopolitan.

b. Marxisme menganut teori, bahwa kehidupan manusia dan tjorak masjarakat sepenuhnya dipengaruhi dan tergantung pada kehidupan kebendaan, jang terkenal dengan teori historis-materialisme.

- c. Marxisme tidak mau tau mengenai kekuatan absolut, yaitu Tuhan Jang Maha Esa, sehingga akibatnja ia anti Tuhan dan anti Agama.
- d. Marxisme dalam perdjoangan njaja menudju kearah terwujudnja susunan masjarakat komunistis, dan menggunakan sistim diktatur proletariat.
- e. Marxisme dengan proletar dan teori meerwaarde-nja dalam perdjoangan mewudjutkan tjita2nja menganut teori perdjoangan kelas, atau klassenstrijd.

Tidak ada satupun diantara basic edeas atau prinsip dari Marxisme seperti tersebut diatas jang dianut oleh Marhaenisme. Disamping ditolak, malahan bertentangan dengan Marhaenisme.

Marhaenisme djelas menganut faham kebangsaan, ialah kebangsaan-kemasjarakatan, atau sosio-nasionalisme. Marhaenisme menghidup-hidupkan, memelihara dan mempertebal semangat kebangsaan.

Sosio-nasionalisme mengakui bahwa bangsa2 adalah se golongan manusia jang tidak terpisah dengan golongan lain, malahan harus hidup bersama dengan golongan2 itu. Oleh karena itu, dalam hubungan internasional, sosio-nasionalisme mengakui kewadjiaban bangsa2 untuk bekerdja sama menjusun masjarakat bangsa2 didunia, bebas dari dominasi, pendjadjahan, penindasan, baik politis, ekonomis maupun kulturil. Dengan perkataan lain, kosmopolitisme atau internasionalisme jang menghapuskan nasionalisme adalah bertentangan dengan Marhaenisme. Marhaenisme tidak dapat sepenuhnya membenakan dalil atau teori bahwa perkembangan kehidupan manusia dan tjorak masjarakat sepenuhnya dipengaruhi dan tergantung pada kebendaan. Tidak dapat menerima teori bahwa tjorak masjarakat se-

penuhnja dipengaruhi dan tergantung pada keadaan ekonomi. Marhaenisme berpendapat, bahwa bukan hanya kondisi ekonomi, akan tetapi djuga kondisi bathin menentukan tjorak dan perkembangan masjarakat. Baik kekuatan rohani, ataupun tjita2 maupun kekuatan djasmaniah atau ekonomi, kedua-duanja sama2 berpengaruh pada gerak, tjorak dan perkembangan masjarakat.

Marhaenisme mengakui sepenuhnya adanya kekuatan absolut (absolute Macht) jang ada pada Tuhan Jang Maha Esa. Baik sosio-nasionalisme maupun sosio-demokrasi, kedua-duanja diresapi sinar hikmah ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dengan demikian djelas, Marhaenisme adalah ber-Tuhan.

Marhaenisme menganut faham demokrasi, jang dalam hal ini adalah sosio-demokrasi. Demokrasi lengkap atau demokrasi komplit, jang mentja kup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan demokrasi kebudayaan.

Faham sosio-demokrasi menghendaki susunan pergaulan hidup sama rata dan sama bahagia, sehingga dengan demikian menolak setiap matjam/bentuk diktatur, termasuk diktatur proletariat. Kaum Marhaen bukan hanya kaum proletar seperti jang dikatakan oleh kaum Marxis ialah kaum pendjual tenaga, bukan hanya kaum buruh jang mendjual tenaganya kepada kaum madjikan.

Kaum Marhaen adalah keseluruhan Rakyat Indonesia dimanapun berada dan dari golongan manpun jang dime-laratkan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Dengan demikian maka didalam Marhaenisme tidak dikenal satu matjam kelas, dalam hal ini kelas proletar jang tertindas, jang selalu berlawanan dan berhadapan dengan kaum penindas, sehingga dengan demikian Marhaenisme tidak menganut sistim perdjoangan kelas seperti jang diadjarkan oleh Marxisme.

Perdjoangan Rakyat Indonesia untuk mentjapai tjita2nja tidak hanya dilakukan oleh satu golongan sadja, akan tetapi oleh segenap potensi kaum Marhaen dan Marhaenis, jang terdiri dari berbagai matjam golongan. Perdjoangan menghantjurkan kolonialisme, dilaksanakan oleh segenap kekuatan Rakyat. Oleh karena itulah teori perdjoangan kelas, atau klas-

senstrijd jang hanja mengenal perdjoangan kelas proletar sebagai kelas jang tertindas, untuk menghantjurkan kelas penindas tidak berlaku bagi Marhaenisme.

Dalam masa pendjadjahan seluruh kekuatan Rakjat berdjaoang menghantjurkan kolonialisme. Dan setelah mentjapai kemerdekaan, maka di alam merdeka ini, dengan tjara dan tjorak lain dari pada didjaman kolonial melandjutkan perdjoangan membina dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan tjita2 jang terkandung didalam Pantjasila.

Dari kenjataan2 dan perbandingan seperti diatas, maka djelas antara Marhaenisme dan Marxisme terdapat perbedaan2 jang prinsipil dan essenil.

Basic ideas, prinsipalia dan essensialia adjaran Marxisme bukan sadja tidak berlaku bagi Marhaenisme, akan tetapi bahkan berlawanan.

Dengan demikian maka djelas, definisi, interpretasi atau pengertian bahwa Marhaenisme adalah "Marxisme jg ditrapkan di Indonesia", adalah satu kekeliruan jang besar.

Itulah sebabnja Sidang MPP-PNI jang ke-I pada bulan Nopember 1966 setjara resmi menolak "Deklarasi Marhaenis" dan diganti dengan "Yudya Pra tidina Marhaenis", jang isinja tegas menjatakan, bahwa Marhaenisme adalah : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi, jang pada hakekatnja sama dengan Pantjasila.

Memang ditindjau dari segi sedjarah, Marhaenisme lebih tua daripada Pantjasila. Sedjak lahirnja, Marhaenisme mengandung unsur2 Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Setjara historis faktuil dalam pidato Lahirnja Pantjasila pada tanggal 1 Djuni 1945 tertjakup pula -

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Dengan demikian tidak salah kiranya, apabila kita katakan bahwa Marhaenisme adalah identik dengan Pantjasila.

IV. MASJARAKAT MARHAENIS

Dari ketegasan2 seperti diatas maka djelaslah, bahwa masjarakat Marhaenis adalah masjarakat Sosialis Pantjasila, masjarakat adil dan makmur, jang tidak membenarkan adanja tindas menindas antar manusia atau antar golongan.

Dengan perkataan lain, pada hakekatnja masjarakat Marhaenis atau masjarakat Sosialis Pantjasila adalah suatu perwujudan setjara konsekwen dari Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Mukadimah sampai dengan Batang Tubuhnja.-

7. Susunan DPP-PNI, sbb :

(Sambungan dari hal 4).-

Sekdjén I : Abdul Madjid.

Sekdjén II : Drs. H.A. Karundeng.

Sekdjén III : Aberson M.S.

Bendahara I : Budi Dipojuwono.

Bendahara II : Notosukardjo.

Bendahara III : Drs. M.A.Gowi.

Anggota2 :

1. Rasjid St.Radjamas.

2. Subekti.

3. H.N.P.S. Siregar

4. H. Mas Ripaie

BAB-III
tentang

MARHAENISME : SUMBER DAN ESSENSIALIA-NJA.

Sumber Marhaenisme

Sumber Marhaenisme adalah Gelora Djiwa Perdjoangan Bangsa Indonesia, yaitu gelora perdjoangan jang timbul karena menderita pahit-getirnja segala kesengsaraan sebagai akibat dari pendjadjahan Bangsa Asing mentjengkeram Bangsa Indonesia selama 3½ abad.

Suatu perdjoangan sengat melawan penindasan dan penghisapan Inperialisme dan Kolonialisme, jang memperkosa kehidupan Bangsa2 jang tidak berdaja. Semangat perdjoangan Bangsa Indonesia itu bukan sadja ingin membebaskan Indonesia dari belenggu Kolonialisme, akan tetapi djuga merupakan suatu tantangan terhadap segala unsur buruk jg merusak ketertiban tata-kehidupan Masjarakat Dunia. Menggeloranja djiwa perdjoangan Bangsa Indonesia itulah jang pada taraf permulaan mendjadi sumber kelahiran segala inspirasi, segala idee, budi, spirit dan dinamik perdjoangan asli-patriotik Bangsa Indonesia.

Unsur2 kekuatan perdjoangan itu kemudian diolah, di perlengkapi dan dirumuskan, sehingga lahirlah suatu azas. Tumbuhlah teori2 perdjoangan Marhaenis jang methodis-rasional-ilmiah dan selandjutnja tersusunlah program2 perdjoangan Marhaenis jang realis-tis dan pragmatis.

Sumber Marhaenisme bukan lah buah pikiran hasil tjip ta Sardjana2 Asing, melainkan Gelora Djiwa Perdjoangan Bangsa Indonesia.

Essensialia Marhaenisme:

Marhaenisme mengandung idee dan spirit kearah mem-

satu-padukan serta menggembleng semua tjita2 dan semua dinamik perdjoangan patriotik Bangsa Indonesia, hidup dari Abad ke Abad dan jang tumbuh tersebar diseluruh Nusantara.

Idee dan spirit itu djelas dan terang bersinar dari segala jang tersurat dan tersirat dalam dokumen2 bersedjarah. Faham, pandangan2, pengertian2 dan konsep2 pokok setjara konkrit telah tjukup banjak digariskan dan dihidangkan. Bagi kita dokumen2 sedjarah itu sudah tjukup banjak mengandung idee2, budi dan pikiran2 sebagai kekajaan spirituil dan idiil jang dapat kita djadikan bahan2 renungan kearah mentjapai falsafah, teori serta program perdjoangan Marhaenisme.

Intisari falsafah jang terkandung dalam Marhaenisme dapat dirumuskan :
Marhaenisme mengakui adanja dua kekuatan hidup, ialah kekuatan idee dan kekuatan materi jang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnja karena adanja pengaruh timbal-balik antara kedua kekuatan tsb.

Marhaenisme mengandung suatu keyakinan, bahwa dinamik jang tumbuh dari keseluruhan segala kekuatan lahir dan batin, dari keseluruhan segala kekuatan materil dan spirituil, dinamik itulah jang menentukan gerak-tumbuhnja Masjarakat, roboh-mengembangnja sedjarah dan bangun-djatuhnja peradaban manusia. Gerak-gerak hidup sesuatu manusia atau bangsa tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mengisi perutnja dengan makanan, untuk melindungi dirinja dengan pakaian dan perumahan, atau hanya didorong oleh keinginan untuk mengisi otak dan djiwanja dengan pikiran dan kejakinan sadja, akan tetapi didorong oleh keseluruhan segala keinginan untuk mentjapai hidup senang dan tenteram didunia ini, yaitu hidup bahagia lahir dan bathin. Karena itu Marhaenisme adalah tuntu-

nan kearah mentjapai keseimbangan jang harmonis antara hidup lahir dan hidup bathin, menudju kesempurnaan hidup seorang dan hidup kemasjarakatan ialah masjarakat jang adil dan makmur dan tata-ten tram.

Itulah intisari falsafah Marhaenisme. Intisari falsafah jang chas ini adalah hasil pengertian jang setepat-tepatnja tentang kekuatan dan daya hidup manusia, hasil penggalian jang dalam dari sumber kehidupan manusia, ialah budi-manusi-kemanusiaan, hasil pemandangan wilajah kehidupan manusia jang seluas-luasnja, ialah masjarakat manusia dan hasil peneropongan djangka kehidupan manusia jang sedjauh-djauhnya jaitu sedjarah manusia.

Bertalian dengan intisari falsafah ini sebagai sumber dan landasan idiil, maka tumbuhlah ideologi baru dengan falsafah faham2, teori2 baru, tumbuh dibidang peri-kehidupan dan perdjjuangan hidup manusia, dibidang kenegaraan, kemasjarakatan, ekonomi dan kebudajaan jang semuanya bersifat dan bertjorak chas, bersifat dan bertjorak spesifik Indonesia. Tumbuhlah Marhaenisme sebagai magmanja Pantjasila, faham socio-nasionalisme socio-demokrasi.

Demikianlah Marhaenisme sebagai magmanja dan kemudian Pantjasila tumbuh menjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia. Marhaenisme adalah suatu ideologi tersendiri dengan pengertian dan faham tersendiri pula terhadap hidup manusia, perkembangan dunia, alam moral, keagamaan, keadilan, hukum, logika, ethika, aesthetika dlsb.

Marhaenisme mengakui Ketuhanan Jang Maha Esa, Perike-manusiaan, Nasionalisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial sebagai fundamen2 sprituil dan materiil jang seharusnya

didjadikan dasar2 hidup kemasjarakatan dan kenegaraan bagi ummat manusia, chususnja bagi Bangsa Indonesia.

Tjita2 Marhaenisme dibidang kenegaraan, kemasjarakatan, ekonomi, kebudajaan adalah lain daripada jg ditjita-tjitakan dan dikonsepsikan oleh faham Liberalisme, faham Marxisme, Komunisme, Nazi-isme, Fascisme. Marhaenisme setjara fundamentil orinsipiil berbeda sekali dari Liberalisme, Marxisme, Komunisme, dan lain2nja, berbeda dalam djiwa, dasar serta tudjuan, berlainan mulai dari landasan idiil, strategi perdjjuangan sampai kepada tudjuannya terachir, ialah sampai pada bentuk dan struktur masjarakat dunia jang diidam2kannya.

Sosialisme jang terkandung dalam Marhaenisme adalah berbeda dengan Sosialisme Utopis, Marxis, Revisionis dan Komunis.

Faham Liberalisme politik dengan Demokrasi Liberalisme, Liberalisme Ekonomi dengan Kapitalismenja, faham Absolutisme, faham materialisme, faham Marxisme dengan dialektis-Materialismenja, Historis-Materialismenja, Ekonomis-determinismenja, dengan teori2 pertentangan kelas, Akumulasi, Krisis dan teori verdelingnja, faham Komunis-Bolsjewik dengan Demokrasi Sentralismenja, kultus-individu dan teori revolusi-dunia model Stalin-nja, faham Nazi-isme dengan teori ras-nja, itu kesemuanya adalah faham kuno jang sempit, sudah lapuk dan pada dasarnya destruktif. Itu semua adalah faham2 jang melihat serta mengukur kehidupan manusia dan perkembangan dunia hanya dari satu dua segi kehidupan sadja, dari segi satu atau dua kepentingan hidup sadja. Faham2 itu hanya dapat melihat satu atau dua pohon kehidupan sadja, akan tetapi buta untuk dapat melihat seluruh hutan.

Marhaenisme adalah lain sekali dari isme kuno termaksud. Dalam Marhaenisme, semua getaran hidup dan irama zaman jang berkembang dari masa kemasa diolah dan disalurkan kearah perikehidupan manusia jang sewadjaranja. Untuk menundjuknkan pada masjarakat dan djuga kepada golongan2 tertentu jang gegabah menuduh Marhaenisme adalah identik dengan Komunis-

me, maka dapat digambarkan didalam garis besarnya ajaran Marhaenisme dalam mendi-
dik warganja sebagai berik-
kut :

1. Seorang Marhaenis sebagai manusia Budaja :

- a. Ia berfikir benar karena ia ber-ilmu. Dengan djalan meng-ilmu ia mentjapai logos, tahu apa jang benar apa jg salah, dan ia milih djalan jang benar dalam hidupnja.
- b. Ia berbudi baik karena ia bermoral. Dengan latihan achlak ia mentjapai Ethos, tahu apa jg baik apa jang buruk, dan ia memilih djalan jang baik dalam hidupnja.
- c. Ia bertjita-tjita indah karena ia ber-rasa seni. Dengan rasa seninja ia tahu apa jang indah apa jang djelek, dan ia mentjintakan keindahan dalam hidupnja.
- d. Ia persembahkan segala hasil karyanja, filsafat ilmu budi, dan seni kepada masjarakat. Sebagai budajawan ia adalah pahlawan kebudayaan Nasional, jang mendjaga dan memelihara kepribadian Bangsa.

2. Seorang Marhaenis sebagai Filusuf :

- a. Ia hidup berdasarkan na-

materi jang karena pengaruh tim bal-baliknja tidak dapat dipisah kan satu sama lainnja.

- d. Ia merindukan kesempurnaan hidup jang bersifat kebahagiaan hidup lahir-bathin dengan ichtiar mentjapai imbangan jang harmonis antara kekuatan hidup lahir dan ke-
kuatan hidup bathin.

3. Seorang Marhaenis sebagai Moral

- a. Ia mentjari kebaikan budi achlak dengan menjilami alam budi nurani manusia sedalam-dalamnja dan menggali segala tata-susila dan sopan santun jang mendjadi norma dan hukum hidup.
- b. Ia mendapatkan kebaikan budi achlak dengan mengakui kaidah2 ke-Tuhanan dan kaidah2 kemanusiaan sebagai dasar naluri hidup.
- c. Ia merindukan keluhuran budi dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara kaidah2 ke-Tuhanan dan kaidah2 kemanusiaan.

4. Seorang Marhaenis sebagai Aestetikus :

- a. Ia mentjari keindahan tjita dengan meresapkan dan mengambil keindahan2 bentuk, sifat dan daja hidup jang ada dalam alam disekitarnja.
- b. Ia mendapatkan keindahan dengan memiliki rasa seni dan daja tjipta.
- c. Ia mentjiptakan dan mentjita-tjitakan kehidupan lahir batin manusia jang indah dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara keindahan pribadi manusia dan keindahan alam disekitarnja.
- d. Ia mentjari keindahan tjita dengan meresapkan dan mengambil keindahan2 bentuk, sifat dan daja hidup jang ada dalam alam disekitarnja.
- e. Ia mendapatkan keindahan dengan memiliki rasa seni dan daja tjipta.
- f. Ia mentjiptakan dan mentjita-tjitakan kehidupan lahir batin manusia jang indah dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara keindahan pribadi manusia dan keindahan alam disekitarnja.
- g. Ia merindukan keluhuran budi dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara kaidah2 ke-Tuhanan dan kaidah2 kemanusiaan.
- h. Ia merindukan kesempurnaan hidup jang bersifat kebahagiaan hidup lahir-bathin dengan ichtiar mentjapai imbangan jang harmonis antara kekuatan hidup lahir dan ke-
kuatan hidup bathin.

5. Seorang Marhaenis sebagai

- a. Ia mentjari keindahan tjita dengan meresapkan dan mengambil keindahan2 bentuk, sifat dan daja hidup jang ada dalam alam disekitarnja.
- b. Ia mendapatkan keindahan dengan memiliki rasa seni dan daja tjipta.
- c. Ia mentjiptakan dan mentjita-tjitakan kehidupan lahir batin manusia jang indah dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara keindahan pribadi manusia dan keindahan alam disekitarnja.

- c. Ia adalah seorang nasionalis, akan tetapi ia bukan seorang chauvinis. Ia tidak melupakan kebahagiaan hidup antar-bangsa.
- d. Ia adalah seorang demokrat, dalam arti penganut-penganut paham demokrasi Pantjasila, bukan penganut demokrasi hukum rimba, bukan penganut demokrasi liberalis, ia merindukan demokrasi - lengkap disegala bidang kehidupan, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.
- e. Ia adalah seorang sosialis, dalam arti bukan penganut totaliterisme yang memperbudak pribadi2 manusia. Ia merindukan keadilan sosial dan karena itu menentang penindasan, penghisapan dan perbudakan sesama manusia.
- f. Ia adalah seorang pemimpin rakyat, yang arif-bijaksana dan mengenal batas2 sikap lunak dan sikap keras.
- g. Ia adalah seorang pedjuang, yang ulet dan revolusioner dinamis dan konsekwen dalam sepak terdjang dan pendirian terhadap tjita2 perdjuaannya.
- h. Ia adalah seorang negarawan, yang tjakap dan djudjur. Ia punya rasa tanggung djawab dan sadar akan segala amanat rakyat yang mendjadi tugas kewadjabannya.
- i. Ia adalah seorang progagandis, yang dapat memikat hati rakyat, dapat membangkitkan kesadaran, keinsjafan, dan dinamik untuk berdjuang didjalan yang benar.
6. Seorang Marhaenis sebagai anggota masyarakat :
- a. Dalam hidup perekonomian ia adalah seorang karyawan jg mendapatkan nafkah penghidupannya dengan kerdja kooperatif. Ia bukan seorang individualis-materialis-egois yang haus-rakus akan harta benda bagi kepentingan hidupnya sendiri.
- b. Ia adalah seorang karyawan yang berkerdja untuk kemakmuran hidup seluruh anggota masyarakat.
- c. Dalam hidup keberahian ia adalah seorang susilawan yang tahu mengendalikan dan membatasi hawa-nafsunja.
- d. Dalam hidup pergaulan ia adalah seorang budiman yang bermoral, sopan santun dan ramah tamah terhadap sesama manusia, tak membedakan karena pangkat, harkat, golongan, atau kepertjajaan.
- e. Dalam hidup keilmuan ia adalah seorang tjendekiawan yang menggunakan ilmunja untuk kemasjarakatan dan kemadjuan masyarakat.
- f. Dalam hidup keguruan ia adalah seorang guru pendidik luhur budi, yang djauh mengawang kedepan akan pertumbuhan bangsanja, penjantun djiwa, pemupuk tunas2 manusia Indonesia baru.
- g. Dalam hidup keagamaan ia adalah seorang Agamawan yang tulus dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Dalam hidup kesenian ia adalah seorang seniman yang mentjipta menurut tuntunan naluri kepribadian Marhaenis.
7. Seorang Marhaenis sebagai ummat manusia :
- a. Ia adalah seorang humanis-idealis yang merindukan suatu persahabatan, persaudaraan dan perdamaian ummat manusia atas dasar azas2 Ketuhanan dan azas2 Kemanusiaan.
- b. Ia adalah seorang humanis-sosialis yang memperdjuaankan keadilan sosial antar manusia, antar bangsa dan antar Negara jg riil, ichlas dan djudjur atas dasar saling bantu membantu, saling hormat-menghormati, dan atas dasar sama deradjat, sama hak dan sama kewadjaban.
- c. Ia adalah seorang humanis-realis yang sadar dan insjaf akan adanya kekurangan dan kelemahan tapi djuga akan adanya daja2 kekuatan setiap pribadi manusia. Ia ingin dan siap menjapu bersih setiap ketidak-adilan, keburukan dan kedjahatan dan

ia ingin menegakkan keadilan dan kebenaran jg abadi, diatas dunia ini.

P E N U T U P.

Sedjarah Revolusi Indonesia telah membuktikan, bahwa faham2 seperti Komunisme, liberalisme dan Marxisme jang toegespast di-Indonesia itu adalah sangat berbahaya bagi Revolusi Nasional Indonesia dan merupakan ratjun bagi Negara dan Bangsa Indonesia.

Imperialisme Marxis, Imperialisme Liberalis dan Imperialisme Komunis itulah jang telah merusak djiwa, dasar dan tudjuan Revolusi Nasional Indonesia.

Dan imperialisme ideologi dan politik jang dilantarkan oleh Negara2 Asing itu lah pula jang telah merusak keutuhan dan persatuan nasional Bangsa Indonesia serta mentrasformirnja mendjadi pertentangan dunia jang toe gespast di-Indonesia.

Itu adalah fakta dalam sedjarah Revolusi Bangsa Indonesia, fakta jang pahit, fakta dan pengalaman jang perlu didjadiakan tjermine dalam membina perkembangan kehidupan politik pada waktu sekarang dan masa datang.

Selama aliran2 Marxis Sosialis-Kanan, Komunis dan Liberalis masih berkuasa atau sekurang-kurangnya berusaha untuk berkuasa, maka pada masa itu pulalah timbul huru-hara, jang pada dasarnya disebabkan pertentangan pertentangan dan permusuhan diantara mereka-mereka sendiri.

Kiranya tidak berlebihan untuk karenanya mengemukakan, bahwa faham jg lahir dari Gelora Perdjuangan Bangsa Indonesia -- ja itu Marhaenisme -- sebagai faham jang chas berkeperibadian Indonesia, maka faham

itulah jang sesuai bagi kaum Marhaen dan Marhaenis jang djumlahnja paling tidak 91 % dari seluruh Rakjat Indonesia.

Dengan ideologi Marhaenisme PNI berdjoang terus sehingga-Marhaen Djaja !

O R M A S 2 P.N.I. :

1. KESATUAN BURUH MARHAENIS (K.B.M.)
2. PERSATUAN TANI NASIONAL INDONESIA (PETANI)
3. GERAKAN WANITA MARHAENIS (WANITA MARHAENIS)
4. GERAKAN PEMUDA MARHAENIS (PEMUDA MARHAENIS)
5. GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (G.M.N.I.)
6. GERAKAN SISWA NASIONAL INDONESIA (G.S.N.I.)
7. KEMBAGA KEBUDAJAAN NASIONAL (L.K.N.)
8. DJAMIATUL MUSLIMIN INDONESIA (D. M. I.)
9. GERAKAN PENDIDIK MARHAENIS (PENDIDIK MARHAENIS)
10. IKATAN SARDJANA RAKJAT INDONESIA (I.S.R.I.)
11. GERAKAN PAMONG RAKJAT MARHAENIS (G. P. R. M.)
12. GERAKAN NELAJAN MARHAENIS (NELAJAN MARHAENIS)
13. IKATAN KRISTEN INDONESIA (IKA-KRESNA)
14. ORGANISASI2 MASSA MARHAEN LAINNJA JANG DENGAN PERSETUJUAN D.P.P. PARTAI MEMUTUSKAN BERNAUNG DIBAWAH P.N.I.